

**Akuntabilitas Auditor Guna Mencegah *Fraud* Dalam Perspektif
Siri' Na Pacce pada Kantor BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan**

Author

Kurraty A'Yunin Ain Shin Anton¹, Andi Nurwanah², Julianty Sidik Tjan³, Salju⁴

Email

kurraty.ayunin.ain.shin@gmail.com

juliyantysidik.tjan@umi.ac.id

nurwanah@umi.ac.id

saljusamuddin68@gmail.com

Afiliasi

¹Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

^{2,3*}Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas auditor dalam mencegah fraud dalam perspektif Siri' na Pacce pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan auditor di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya lempu' (kejujuran) harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit, melaporkan atau menyampaikan fakta secara jujur sesuai dengan kenyataan. Dan dalam nilai ada' tongeng (berkata benar) sebagai sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu sehingga aktualisasi ada' tongeng dalam dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi auditor. sehingga semakin besar nilai budaya Siri 'Na Pacce yang dianut oleh auditor etnis Bugis (salah satu suku bangsa Sulawesi Selatan), semakin kecil perilaku fraudnya. Sebaliknya jika semakin kecil nilai budaya Siri 'Na Pacce yang dianut oleh auditor etnis Bugis maka semakin besar pula perilaku fraudnya. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga membuktikan bahwa nilai budaya Siri 'Na Pacce dapat menjadi salah satu faktor penekan perilaku fraud. Sehingga diharapkan dengan menanamkan nilai- nilai budaya Siri 'Na Pacce, Perilaku fraud dapat dicegah dan dapat memperkuat akuntabilitas auditor dalam melakukan audit.

Kata kunci: Akuntabilitas Auditor, Fraud, Siri' na Pacce

Pendahuluan

Fraud merupakan bahaya laten yang mengancam dunia. Hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) global menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Di Indonesia korupsi dikenal dengan KKN yang merupakan singkatan dari Kolusi dan Korupsi Nepotisme. Korupsi bisa terjadi karena kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan pada akhirnya kebiasaan tersebut membentuk budaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amin, 2019) budaya dan norma sosial terkait korupsi akan cukup sulit untuk diubah. Korupsi merupakan salah satu tantangan negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah melekat dalam segala aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Korupsi tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga di tingkat pusat dimana pusat merupakan tingkat pemerintahan tertinggi. Tumbuh dan

berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan kinerja pemerintah dan penegakan hukum (St. Ramlah, 2008).

Pada semester I tahun 2020 ICW menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 372 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah nilai suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp20,2 miliar, dan jumlah pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar. Rata-rata setiap bulannya ada 28 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 62 orang. Fenomena korupsi yang banyak terjadi di Indonesia dalam era reformasi ini menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan di tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Fenomena korupsi di daerah yang semakin terbuka, terjadi karena terdapat perbedaan atau tidak konsisten peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. *Money politics* merupakan salah satu bentuk terjadinya korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) di daerah. Otonomi daerah pada dasarnya diberikan kepada daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance* (Maryulianti, 2015).

Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan budaya, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan dengan empat etnis di dalamnya memiliki budaya yang menjadi panduan dalam menjalankan hidup, yaitu siri'na pacce. Siri'na pacce sendiri memiliki empat unsur di dalamnya, yaitu aktualisasi diri, rasa malu dan bersalah, kesetiaan, serta kejujuran. Aktualisasi diri merupakan keinginan individu untuk mengembangkan potensinya sendiri. Rasa malu dan bersalah merupakan bentuk sikap yang sangat dirasakan individu saat tidak dapat mentaati peraturan yang ada di masyarakat. Kesetiaan merupakan kemampuan dalam menjalankan amanah yang diberikan. Kejujuran yaitu individu berperilaku sesuai dengan hati nurani (Karamoy & Wokas, 2015). Dengan meresapi setiap unsur siri'na pacce, yaitu individu bekerja karena untuk mengembangkan potensinya, mentaati peraturan yang ada di masyarakat, dapat menjalankan amanah, dan melakukan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya, maka individu tidak akan melakukan korupsi. Maka dari itu, kita tidak boleh melupakan budaya kedaerahan karena setiap budaya dibuat dengan tujuan dan maksud masing – masing. Siri'na pacce sendiri merupakan sebuah nilai budaya yang dijadikan pedoman oleh masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja dalam menjalani kehidupan sehari – hari. Siri' berarti malu yang jika diartikan secara harfiah artinya harga diri. Sedangkan, pacce berarti pedih dan secara harfiah diartikan sebagai rasa solidaritas dan tolong menolong (Maryulianti, 2015).

Akuntabilitas auditor merupakan jawaban dan klarifikasi atas pelaksanaan tindakan seseorang atau entitas kepada pihak yang berhak menanyakan jawaban atau informasi dari pihak atau entitas yang berwenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja (Salsabila dan Prayudiawan, 2011). Rasa tanggung jawab atau akuntabilitas merupakan keadaan yang dirasakan oleh auditor bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan standar akuntan publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kesimpulan yang dibuat kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung (Supardi dan Mutakin 2008). Penelitian yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas yang melekat dan dijalankan pada nilai-nilai kearifan lokal telah dilakukan oleh (Syatar et al., 2018) yang menguak akuntabilitas dibalik tabir nilai kearifan budaya Jawa menemukan konsep obah-mamah-sanak. Konsep-konsep tersebut selanjutnya digunakan sebagai penyusunan konsep dasar arus kas nilai tambah-neraca. Hal serupa juga telah dilakukan oleh Randa dan (Yusrianti, 2015) yang mentransformasikan nilai kearifan budaya Tana Toraja.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa di Indonesia memiliki beraneka suku bangsa dan setiap wilayah memiliki ciri khas dan nilai budaya yang berbeda, salah satunya adalah nilai budaya siri' na pacce. Budaya siri' na pacce adalah salah satu prinsip atau pegangan hidup masyarakat Makassar khususnya yang berdomisili di kabupaten Gowa. Siri' na pacce merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Makassar. Dengan memahami bentuk akuntabilitas yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk mengolaborasi praktek- praktek akuntabilitas yang ada guna menanamkan nilai budaya dalam akuntabilitas yang dapat diterima baik oleh masyarakat yang mengandung nilai-nilai akuntabilitas budaya lokal (Pangestika et al., 2014).

Berdasarkan gambaran ini, maka sangat penting untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal disetiap daerah sebagai salah satu bentuk strategi dalam upaya mencegah terjadinya fraud. Dengan demikian penelitian ini berjudul "Akuntabilitas Auditor Dalam Mencegah *Fraud* Dalam Perspektif Siri' Na Pacce Pada Kantor Bpk Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)".

Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini terdiri dari teori etika *utilitarianisme* dan teori *planned behavior*. (Hapsari & Wiguna, 2015) menjelaskan, Teori *utilitarianisme* atau utilitarisme yang berasal dari kata Latin utilis yang berarti "bermanfaat", berpandangan bahwa suatu perbuatan atau tindakan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Utilitarianisme, suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Semakin tinggi kegunaannya maka semakin tinggi nilainya. Sedangkan teori *planned behavior* merupakan teori yang mempelajari perilaku aktual seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu secara langsung dipengaruhi oleh niat perilakunya, yang secara bersamaan ditentukan pula oleh sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) terhadap perilaku tersebut (Putri et al., 2020).

Akuntabilitas Auditor

Muraiya & Nadirsyah, (2018) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini, karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik, dan pada upaya terciptanya good governance. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia saat ini termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah maraknya praktik *fraud* yang terjadi diberbagai instansi pemerintah. Salah satu jenis praktik fraud yang dimaksud adalah korupsi. Akuntabilitas publik yang harus dijalankan organisasi sektor publik mempunyai beberapa dimensi. Akuntabilitas pada penelitian (Oktari & Nasir, 2011), menggunakan dua indikator yaitu: Motivasi dan kewajiban sosial. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

Pencegahan *Fraud*

Definisi *Fraud* menurut (Udayani & Sari, 2017) adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. tindakan-tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti atau layanan untuk

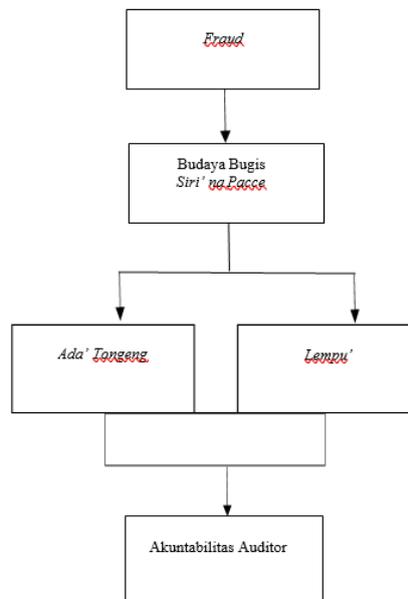
menghindari pembayaran atau kehilangan layanan; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Fraud ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Menurut (Karamoy & Wokas, 2015) ada tiga kondisi dimana seseorang dapat melakukan *fraud* yaitu: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (rasionalisasi). *pressure* atau tekanan yang dirasakan pelaku fraud yang dipandanginya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain (*perceived non-shareable financial needs*), maka dari itu si pelaku fraud mulai mempertimbangkan tindakan ilegal seperti menyalahgunakan aset perusahaan atau melakukan salah saji yang disengaja pada laporan keuangan untuk menyelesaikan masalah keuangannya. *opportunity* atau kesempatan yang didefinisikan sebagai peluang untuk melakukan *fraud* seperti yang dipersepsikan pelaku fraud. Walaupun individu memiliki tekanan dalam dirinya untuk melakukan fraud, itu tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada kesempatan. Dan Rasionalisasi adalah pembenaran yang “dibisikkan” untuk melawan hati nurani si pelaku *fraud*.

Siri Na Pacce

Budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan Tana Toraja) ada sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu siri' na pacce. Secara lafdziyah siri' berarti : rasa malu (harga diri), sedangkan pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse yang berarti : pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Kata siri' dalam bahasa Makassar atau Bugis bermakna “malu”. Sedangkan pacce (Bugis: pesse) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau “iba”. Struktur siri' dalam budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu : (1) Siri' Ripakasir', (2) siri' mappakasiri' siri', (3) siri' tappela' siri' (Bugis : teddeng siri'), dan (4) siri' mate siri'. Kemudian, guna melengkapi keempat struktur siri' maka pacce atau pesse menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan siri' na pacce. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, siri' mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. Siri' adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, siri' adalah sesuatu yang tabu bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. sedangkan, pacce mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan. Ini adalah salah satu konsep yang membuat suku Bugis-Makassar mampu bertahan dan disegani, pacce merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban penderitaan orang lain, kalau istilah dalam bahasa Indonesia “Ringan sama dijinjing berat sama dipikul” (Syatar et al., 2018). Nilai siri' juga berhubungan dengan iman dan esensi manusia. Sebagai manusia yang hidup dalam kultur budaya Bugis-Makassar akan membuat individu sangat menghindari setiap perbuatan yang menyebabkan

hilangnya malu seperti melakukan tindak kecurangan akuntansi jika kedapatan melakukan kecurangan akuntansi maka lebih baik mati ketimbang hidup harus menanggung malu. Berbeda dengan nilai pacce yang berarti menjunjung tinggi persaudaraan dan kemanusiaan Dalam praktek akuntansi dapat mengajarkan Akuntan mengerjakan pekerjaannya demi kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan dirinya, memegang teguh prinsip kesetiakawanan dan menghormati rekan seprofesi. Dengan menjunjung tinggi nilai siri'na pacce seorang akuntan akan dapat menjaga integritas dan nilai kejujuran serta independensi yang dimilikinya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. Penelitian kami lakukan pada auditor atau akuntan publik pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) dan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini lebih 2 (dua) bulan yakni bulan April sampai dengan bulan Mei 2021. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang diminta pendapatnya melalui wawancara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas 3 jenis, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dan metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam menganalisis data kami menggunakan beberapa macam analisis yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Dalam menganalisis data kami menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan bahwa bagaimana akuntabilitas auditor dalam mencegah *fraud* pada kantor BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai beberapa auditor yang dilakukan pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu harga diri/ *Siri*' merupakan suatu kehormatan bagi auditor. Harga diri adalah hal terpenting bagi auditor, harga diri / *siri* ' sama seperti mahkota, lebih baik kita menjaga mahkotanya, maka mahkota tersebut tidak akan jatuh dan diambil oleh orang lain. Auditor dengan harga diri akan lebih dihormati oleh klien. berdasarkan hasil penelitian juga membuktikan bahwa nilai budaya *Siri 'Na Pacce* dapat menjadi salah satu faktor penekan perilaku *fraud*. Sehingga diharapkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya *Siri 'Na Pacce*, Perilaku *fraud* dapat dicegah dan dapat memperkuat akuntabilitas auditor dalam melakukan audit.

1. Nilai *Lempu*' dan *Ada' Tongeng* Dalam Dimensi Akuntabilitas Kejujuran.

Lempu' dalam bahasa Indonesia artinya jujur, sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks kata ini berarti ikhlas, benar, baik atau adil. Sehingga lawan katanya adalah curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan sebagainya. Kejujuran (*lempu*') menjadi kunci utama dalam kepemimpinan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fitri :

"...*Lempu*' (kejujuran) adalah seorang auditor harus selalu jujur dalam mengaudit, ia harus melaporkan semua temuan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada".

Senada dengan Ibu Fitri, Ibu Novi juga mengatakan bahwa :

"...*Lempu*' (kejujuran) sama dengan integritas auditor, auditor harus selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran karena jujur adalah harga yang tetap, jika tidak jujur maka auditor akan dengan mudah memanipulasi data dan akan lebih cepat tergoda oleh iming-iming. Uang (*fee*) karena kepercayaan auditor atau akuntan publik klien adalah segalanya".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa nilai budaya *lempu*' (kejujuran) harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit, melaporkan atau menyampaikan fakta secara jujur sesuai dengan kenyataan yang terjadi, diperlukan kejujuran dalam meningkatkan kinerja auditor karena kejujuran sangat penting agar seorang auditor dapat terhindar dari penyalahgunaan tugas sebagai akuntan publik. Kejujuran bisa dikatakan nilai yang paling dibutuhkan dalam dunia auditor. Pada akuntabilitas kejujuran dikatakan bahwa akuntabilitas ini terkait dengan penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas ini sesuai dengan makna *lempu* pada budaya *siri' na pacce* yang artinya jujur.

2. *Ada' Tongeng* (Berkata Benar)

Ada' tongeng dalam bahasa Indonesia artinya berkata benar, kebenaran. Dalam KBBI kebenaran berasal dari kata benar yang artinya sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), betul, tidak salah apa yang dikatakannya. Kebenaran adalah keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya. *Ada' tongeng* (kata-kata yang benar) maksudnya agar manusia berpegang pada *ada' tongeng*, melakukan perbuatan sesuai apa yang diucapkan. Seperti yang dikatakan Ibu Fitri:

"...*Ada' tongeng*, auditor harus menjunjung tinggi kebenaran, mengatakan benar jika benar, mengatakan salah jika salah, dan tidak memanipulasi temuan selama audit".

Sedangkan Menurut Bapak Robby mengatakan bahwa :

“...*Ada’ tongeng* dimana seorang auditor dituntut untuk selalu mengatakan kebenaran secara tidak memihak dan selalu konsisten dengan perkataannya untuk menjaga kepercayaan klien dan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa *Ada’ tongeng* sangat berperan dalam meningkatkan kinerja auditor dan sangat mendukung prinsip profesional auditor, mengatakan setiap temuan adalah benar tanpa ditutup-tutupi. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pengguna laporan keuangan terhadap kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan, auditor tidak akan digunakan lagi.

Akuntabilitas Auditor

Definisi dari akuntabilitas auditor memandang bahwa setiap individu atau organisasi wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagai wujud akuntabilitas individu atau organisasi. Konsep ini mengingatkan setiap individu atau organisasi akan pentingnya akuntabilitas dibangun guna meningkatkan kepercayaan dan keberterimaan satu sama lain dalam organisasi baik itu pertanggungjawaban pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri, yang mengatakan bahwa:

“... Akuntabilitas itu harus kita lakukan sebagai pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi kita harus akuntabel mengenai apa saja yang berkaitan dengan pemerintahan, kita ini dipilih oleh masyarakat karena percaya sama kita. Jadi akuntabilitas itu penting”.

Dari hasil wawancara di atas, maka secara tersirat dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Seperti yang dikatakan juga oleh Bapak Robby yang mengatakan bahwa:

“...Akuntabilitas itu sangat penting untuk melakukan tugas yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada didalamnya. Misalnya yaa memberikan masukan yang sesuai dengan aturan yang berlaku atau memberikan hasil laporan secara transparan sesuai data yang kita dapatkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kehidupan akuntabilitas merupakan hal yang sangat kompleks, karena setiap akuntan dalam hidupnya tidak pernah lepas dari akuntabilitas, terutama dalam menangani klien dan auditor. Seorang auditor harus memiliki indikator seperti: seberapa besar motivasi auditor untuk menyelesaikan audit. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan auditor untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Berapa usaha auditor (*power of mind*) untuk menyelesaikan auditnya. Auditor dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan upaya yang lebih besar (kekuatan pikiran) daripada auditor dengan akuntabilitas rendah saat menyelesaikan audit.

Fraud

Apapun aturan dan prosedur diciptakan, sangat dipengaruhi oleh manusia yang memegang kuasa untuk menjalankannya, karena tidak semua orang jujur dan beintegritas tinggi. Kecurangan yang terjadi di lingkungan korporasi dipengaruhi 3 unsur faktor pendorong, yaitu: motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran. Dari ketiga unsur tersebut yang dapat dikendalikan oleh perusahaan hanya satu faktor, yaitu faktor kesempatan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Novi yang mengatakan bahwa :

“...Adanya kebutuhan yang mendesak, kesempatan, serta adanya jabatan dan kekuasaan membuat seseorang bisa berbuat kecurangan”.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Fitri yang mengatakan bahwa:

“...Adanya penilaian yang tidak objektif yang paling sering menjadi dasar seorang auditor melakukan kecurangan”.

Pencegahan tindakan kecurangan merupakan cara pertama untuk menghentikan munculnya tindakan kecurangan. Deteksi tindakan kecurangan biasanya muncul setelah pencegahan tindakan kecurangan gagal. Yunintasari (2010) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan adalah dengan cara meningkatkan pengendalian internal, karena pada dasarnya unsur yang menentukan terjadinya kecurangan adalah manusia itu sendiri dan sistem pengendalian dalam perusahaan tersebut. Manusia dengan perilaku hidup yang dianutnya menentukan wujud tingkah lakunya dalam pergaulan dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan suatu sistem pengendalian intern dibangun untuk menghalangi atau menghambat kemungkinan terjadinya kecurangan.

Implikasi Nilai Siri Na Pacce Sebagai Dasar Akuntabilitas Auditor Dalam Mencegah Fraud

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, kehilangan harga diri hanya dapat dikembalikan dengan biaya hidup oleh pihak lawan bahkan orang yang bersangkutan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, harga diri merupakan hal terpenting agar nilai dan kehormatannya dapat setinggi-tingginya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fitri :

“...Siri' (malu / harga diri) jika auditor sudah memiliki rasa malu sehingga tidak akan melakukan kecurangan, kapan tidak sesuai dengan siri' na pacce maka saya melakukan pekerjaan asal- asalan. Betul-betul itu siri' na pacce bukan hal yang main-main. Karena dalam sekali itu maknanya”.

Sedangkan menurut Bapak Robby mengatakan bahwa:

“...Siri' (malu / harga diri) dimana budaya malu dapat dijadikan sebagai penjaga keamanan bagi kita, seperti malu melakukan pelanggaran, malu telat dalam menjalankan tugas, dan malu melakukan penipuan atau melanggar kode etik dari seorang akuntan publik”.

Berdasarkan petikan wawancara diatas, dapat dipahami betapa pentingnya memahami nilai yang substansial dari agama dan nilai budaya. Nilai tersebut banyak mengandung pesan kebaikan bagi manusia. Pemahaman akan nilai agama dan budaya masih dimaknai secara sebagian, bahkan cenderung lebih dari sekedar teks belaka daripada isi. Seolah agama masih sebagai simbol dan budaya hanya sebagai pakaian luar. Nilai budaya belum dianggap ruh yang merupakan spirit untuk menegakkan kebenaran. *Siri' na pacce* merupakan suatu kearifan budaya lokal yang dapat diadopsi berkaitan dengan prinsip, nasehat, tatanan, norma, dan perilaku leluhur masa lalu. Nilai *siri' na pacce* sangat urgen untuk diaplikasikan dalam menata berbagai fenomena yang muncul, utamanya dalam mengantisipasi sekaligus mengeliminasi auditor yang tidak independen yang berujung pada pelanggaran.

Pembahasan

Pelaksanaan akuntabilitas perlu dikolaborasikan dengan budaya lokal. Seperti pada masyarakat Bugis, Makassar dan Gowa yang memiliki budaya siri' na pacce. Di mana *siri' na pacce* merupakan suatu falsafah yang tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dan yang lainnya mempunyai keterkaitan makna dan hubungan, sehingga dalam pembagian siri' na pacce keduanya saling berkaitan erat. Ketika suatu pihak tidak memiliki lagi sifat *siri' na pacce* maka akan menimbulkan hal-hal buruk, baik bagi dirinya, orang lain dan lingkungannya. Falsafah *siri' na pacce* yang sudah ada dan dipegang sejak dahulu oleh masyarakat Suku Makassar serta merupakan pandangan hidup yang perlu dipertahankan dan perlu diselaraskan dengan ajaran dan akidah Islam. Ada ungkapan suku Makassar yang berbunyi punna tena siriknu, paccenu seng pakania (kalau tidak ada siri'-mu pacce-lah yang kau pegang teguh). Apabila *siri' dan pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang (tidak punya malu/*siri'*)

karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri (tidak merasakan sedih/*pacce*).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diperlukan akuntabilitas dalam dunia kerja. Ada banyak orang yang berinteraksi dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka, baik secara individu maupun individu. Akuntabilitas berperan dalam proses interaksi ini untuk menghindari friksi yang dapat menimbulkan konflik. Solusi tersebut dapat terwujud jika akuntabilitas auditor dibangun dengan pendekatan kultural, sebagaimana budaya Bugis bagi akuntabilitas auditor dalam memberikan opini atas suatu audit. Dorongan psikologi membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang telah diambil, akuntabilitas auditor mempunyai peran dan tanggung jawab, seperti tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan, menjaga sikap, mengkomunikasikan informasi dan tanggung jawab, temuan tindakan klien yang melanggar hukum. Peneliti meyakini bahwa apa yang diajarkan di lingkungan keluarga memiliki integrasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Meski sebenarnya tak lepas dari peran ajaran agama, masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi budaya mereka.

Dilihat dari unsur-unsurnya *Siri 'Na Pacce* nilai budaya dan terkait dengan karakteristik perilaku fraud, individu yang melakukan fraud akan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya hanya ketika mendapatkan reward atau hadiah dari individu lain untuk melakukan pekerjaannya. Individu juga tidak memiliki rasa malu dan bersalah karena tidak mentaati aturan yang ada di masyarakat. Orang-orang yang melakukan fraud tidak dapat dipercaya karena telah melanggar amanah dan janji yang telah mereka buat. Individu tidak berperilaku sesuai dengan hati nurani dan kebenaran karena tindakan yang dilakukan individu sangat merugikan masyarakat sekitar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori etika utilitarianisme menurut (Amin, 2019) yang menyatakan bahwa teori utilitarianisme atau utilitarisme yang berasal dari kata Latin utilis yang berarti “bermanfaat”, berpandangan bahwa suatu perbuatan atau tindakan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Utilitarianisme, suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Semakin tinggi kegunaannya maka semakin tinggi nilainya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka kesimpulan dalam penelitian kami adalah bahwa harga diri/ *Siri'* merupakan suatu kehormatan bagi auditor. Harga diri adalah hal terpenting bagi auditor, harga diri / *siri'* sama seperti mahkota, lebih baik kita menjaga mahkotanya, maka mahkota tersebut tidak akan jatuh dan diambil oleh orang lain. Auditor dengan harga diri akan lebih dihormati oleh klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya lempu' (kejujuran) harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit, melaporkan atau menyampaikan fakta secara jujur sesuai dengan kenyataan. Dan dalam nilai ada' tongeng (berkata benar) sebagai sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu sehingga aktualisasi ada tongeng dalam dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi auditor. sehingga semakin besar nilai budaya *Siri 'Na Pacce* yang dianut oleh auditor etnis Bugis (salah satu suku bangsa Sulawesi Selatan), semakin kecil perilaku *fraudnya*. Sebaliknya jika semakin kecil nilai budaya *Siri 'Na Pacce* yang dianut oleh auditor etnis Bugis maka semakin besar pula perilaku *fraudnya*.

Referensi

- Amin, A. (2019). Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika *Siri'na Pacce* : Persepsi Mahasiswa Akuntansi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 51–57.
<https://doi.org/10.33096/Atestasi.V2i1.75>

- Hapsari, D. W., & Wiguna, F. (2015). Pengaruh Skeptisisme Profesional Dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Survei Pada Auditor Kap Di Malang) Influence Of Professional Skepticism And Independence Of The Auditor On Fraud Detection (Survey On Auditor Kap In Malang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 453–461.
- Karamoy, H., & Wokas, H. R. N. (2015). Pengaruh Independensi Dan Profesionalisme, Dalam Mendeteksi Fraud Pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 6(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v6i2.10492>
- Maryulianti, H. (2015). Determinasi Kualitas Audit Dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Detection Pada Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1–16.
- Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 236–253.
- Oktari, R., & Nasir, A. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 19(02), 8841.
- Pangestika, W., Taufik, T., & Silfi, A. (2014). Pengaruh Keahlian Profesional, Independensi, Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 1–15.
- Putri, W. A., Prihatni, R., & Murdayanti, Y. (2020). Pengaruh Independensi, Pengalaman, Dan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (Tabk) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 51–56. <https://doi.org/Xx.Xxxxx/Japa/Xxxx.x%0a>
- St.Ramlah. (2008). Pengaruh Rationalization Dan Local Wisdom Terhadap Fraud. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 461.
- Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Rahman, A. (2018). Mitigating Fraud In E-Commerce By Adapting The Concept Of Siri' Na Pacce Muhammad. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5572(11), 189–210.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1774–1799.
- Yusrianti, H. (2015). Pengaruh Pengalaman Audit , Beban Kerja , Task Specific Knowledge Terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.13(1), 55–72.